

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKIP OPD berisi gambaran perwujudan Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat tidak lepas atau sesuai dengan Visi sebagaimana tercantum dalam Renstra yang disusun, yaitu : **"BKPP Wilayah I sebagai Badan Koordinasi yang handal"**

Visi tersebut juga mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu : **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"** beserta misinya, yaitu :

1. **Misi Pertama**, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. **Misi Kedua**, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.
3. **Misi Ketiga**, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
4. **Misi Keempat**, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.

5. **Misi Kelima**, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan tugas pokok Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, pada Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan 7 (tujuh) program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan.

Untuk melaksanakan 7 Program dan 29 Kegiatan tersebut, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat tahun 2016 mendapat alokasi anggaran Rp. 16.980.760.483,00. Belanja Langsung Rp. 8.564.491.500,00. dan Belanja Tidak Langsung Rp. 8.416.268.983,00.

Realisasi Keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 16.390.857.317,00. (96,53%), dengan rincian Belanja Langsung terealisasi Rp. 8.526.997.765,00 (99,56%), Belanja Tidak Langsung terealisasi Rp. 7.863.859.552,00 (93,44%). Realisasi fisik dari program dan kegiatan tahun 2016 terealisasi mencapai 100%.

Bogor , Januari 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I,

Dr. Ir. SUPRIYATNO. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600602 198603 1 005

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I disusun mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat. Laporan ini berisi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan penjabaran visi, misi dan strategi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I.

Demikian Laporan ini untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Bogor , Januari 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I,

Dr. Ir. SUPRIYATNO. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600602 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018	7
2.1.1 Visi dan Misi	8
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	8
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	9
2.1.4 Kebijakan dan Program	9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2015	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13

3.1. Capaian Kinerja	13
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	13
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja	15
3.1.3 Pengukuran Indikator Kinerja	16
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	18
3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja	18
3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan	19
3.2 Akuntabilitas Anggaran	21
 BAB IV P E N U T U P	 22